SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

# BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

# TAHUN 2015

BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
2016

**SEKRETARIAT KABINET**

**REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN KINERJA

# (LKj)

# TAHUN 2015

**BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI**

**2016**

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** ..... 2

**KATA PENGANTAR** ..... 4

**IKHTISAR EKSEKUTIF** ..... 5

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 7

B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama ..... 8

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi ..... 9

D. Struktur Organisasi ..... 10

E. Sistematika Laporan ..... 12

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis ..... 13

B. Perjanjian Kinerja ..... 16

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja ..... 19

B. Realisasi Anggaran ..... 40

**BAB IV PENUTUP** ..... 41

**LAMPIRAN**

A. Lampiran I

Capaian Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 ..... 43

B. Lampiran II

Rincian Output Sasaran 1 Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 ..... 44

C. Lampiran III

Saran dan Masukan yang diberikan Unit Kerja dalam rangka Pengukuran Pemanfaatan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja ..... 46

D. Lampiran IV

Penghitungan Ketepatan Waktu Dokumen/Laporan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi ..... 48

E. Lampiran V

Rincian Capaian Output Sasaran 2 Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi ..... 50

# DAFTAR ISI

F. Lampiran VI

Rincian Capaian dan Area Perbaikan yang dibutuhkan terhadap Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh KEMENPAN dan RB..... 51

G. Lampiran VII

Rincian Capaian dan Area Perbaikan yang dibutuhkan terhadap Hasil Penilaian PMPRB di Sekretariat Kabinet..... 52

H. Lampiran VIII

Gambaran Rinci terhadap Realisasi Penanganan Surat/ Berkas yang didistribusikan Tepat Sasaran Selama Tahun 2015..... 53

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 yang merupakan wujud pertanggung jawaban Biro sebagai bagian dari institusi Sekretariat Kabinet terhadap publik dan para *stakeholders*.

Laporan Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2015.

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi akan terus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan ini agar dapat membantu pejabat/pegawai di lingkungan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada khususnya dan seluruh jajaran organisasi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian, program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 17 Februari 2016

Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan

Reformasi Birokrasi

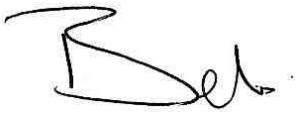

Beben Hurmansyah

Laporan Kinerja (LKj) Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2015 Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis dan 3 (tiga) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Seluruh program dan kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 sebesar **102,14**% dengan perhitungan dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, sebanyak 7 (tujuh) indikator dengan capaian kategori "Memuaskan" dan 1 (satu) indikator dengan capaian "Sangat Baik". Capaian kinerja didefinisikan "Memuaskan" jika capaian ≥ 100%, dan kategori "Sangat Baik" berada pada rentang capaian 85%-<100%. Tabel capaian kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi adalah:

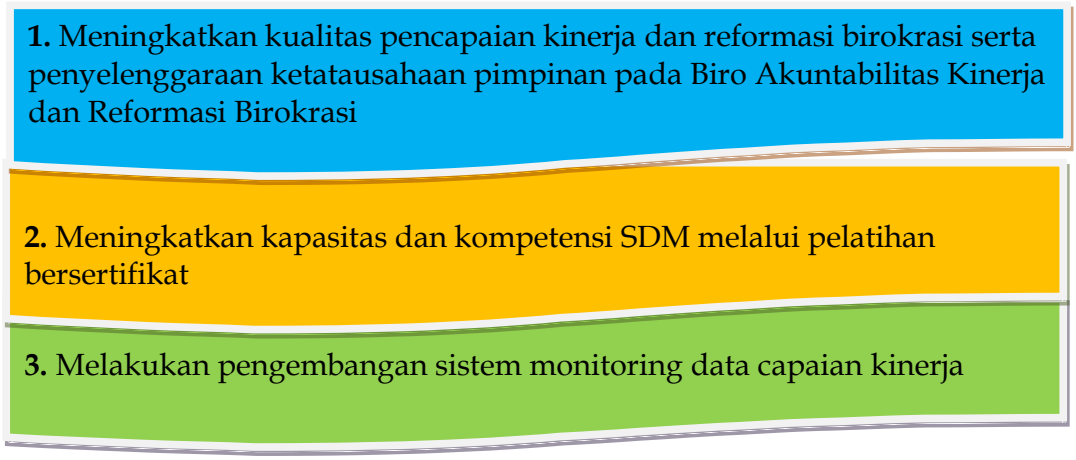

Realisasi anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.666.697.739,00 atau 55,94% dari pagu setelah revisi terakhir Rp.1.191.797.000,00. Realisasi anggaran tidak terserap seluruhnya karena ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya ke Tahun 2016.

# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) terus meningkat. Sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan *good governance*, Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2014. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan kinerja pemerintah tersebut disusun secara periodik yaitu Laporan Kinerja Interim (triwulanan) dan Laporan Kinerja Tahunan.

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Eselon II) diwajibkan menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kepala Biro) kepada Pimpinan Unit Organisasi (Deputi). LKj Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

## B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas karena Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi adalah motor penggerak implementasi SAKIP dimana proses koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Kinerja merupakan salah satu tugas pokok dari Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Implementasi SAKIP pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat mendukung Sekretariat Kabinet menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana supaya implementasi SAKIP di seluruh unit kerja dapat meningkat dan pencapaian atas Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat terus meningkat.

Selain sebagai motor penggerak Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi juga berperan penting untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih dan akuntabel. Kedua peran penting tersebut juga ditunjang dengan pengelolaan dan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet yang efektif dan efisien.

## C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Borokrasi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

### 1. Kedudukan

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet.

### 2. Tugas

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

a) Penyelenggaraan perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;

b) Penyelenggaraan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;
c) Pengembangan sistem manajemen kinerja;
d) Penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
e) Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
f) Pengkajian dan pengambangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
g) Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;
h) Penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, serta peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

## D. Struktur Organisasi

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

### 1. Bagian Akuntabilitas Kinerja

Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi dan individu di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### 2. Bagian Reformasi Birokrasi

Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### 3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, pengendalian persuratan, dan penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Struktur organisasi Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

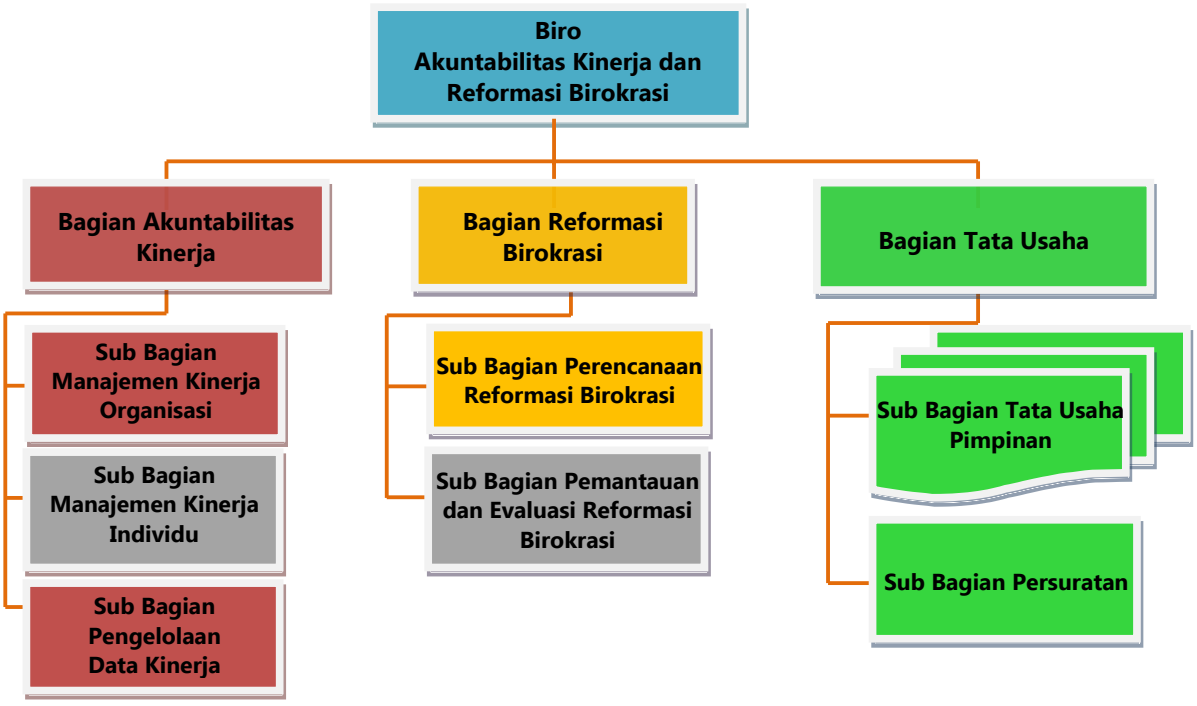

## E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKj Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

*Executive Summary* (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj tahun 2015, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi serta gambaran tugas dan fungsi Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta struktur organisasinya.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan gambaran rencana strategis Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan ikhtisar perjanjian kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Arah kebijakan Sekretariat Kabinet sebagaimana tergambar dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 adalah **mengoptimalkan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.** Dengan mengacu kepada arah kebijakan Sekretariat Kabinet, maka arah kebijakan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi adalah:

**Mengoptimalkan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet.**

Berikut ini merupakan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang didasarkan pada visi dan misi yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Sekretariat Kabinet setiap tahunnya menetapkan IKU untuk level kementerian sampai dengan eselon II. Sehubungan dengan adanya restrukturisasi organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dan telah ditetapkannya tugas dan fungsi terbaru berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu unit kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2015 telah diterbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2015. Berikut ini gambaran IKU Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi periode setelah restrukturisasi organisasi Tahun 2015.

## Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Periode setelah restrukturisasi Organisasi Tahun 2015

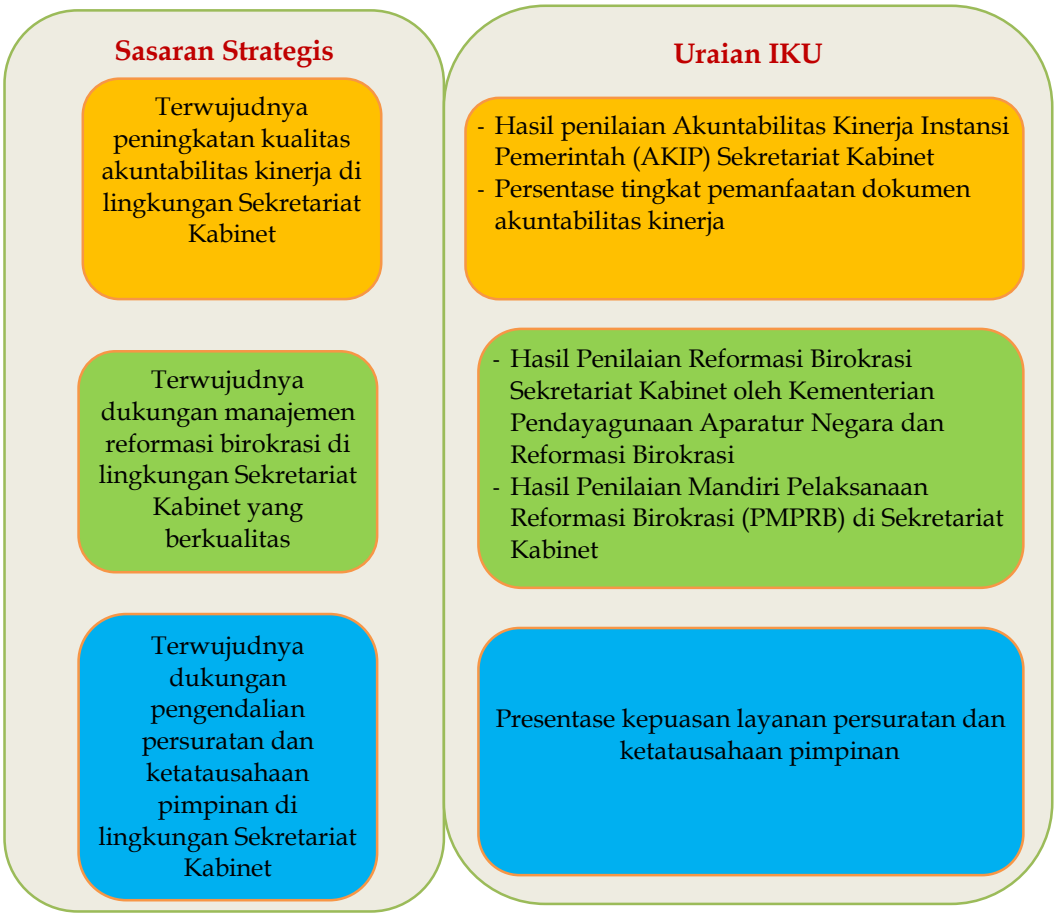

Berikut ini adalah indikator kinerja serta target tahun 2015 pada matriks kinerja dan pendanaan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015-2019.

| INDIKATOR | TARGET 2015 |
|---|---|
| Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet | B (65) |
| Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja | 80% |
| Persentase dokumen akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 65 |
| Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Kabinet | 75 |
| Persentase dokumen reformasi birokrasi yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan | 70% |
| Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat waktu dan tepat sasaran | 100% |

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Penetapan kinerja juga berfungsi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi menyusun Penetapan Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada

pimpinan dan *stakeholder* periode setelah restruktur Organisasi Tahun 2015.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Beben Hurmansyah
Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Farid Utomo
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menangah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Beben Hurmansyah

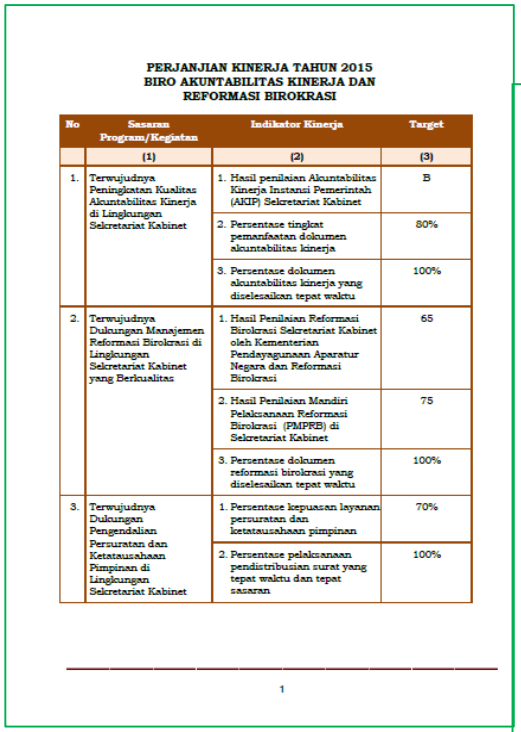

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**
**BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI**

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) |
| 1. | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet | 1. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet | B |
| | | 2. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja | 80% |
| | | 3. Persentase dokumen akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| 2. | Terwujudnya Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas | 1. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 65 |
| | | 2. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Kabinet | 75 |
| | | 3. Persentase dokumen reformasi birokrasi yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| 3. | Terwujudnya Dukungan Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kabinet | 1. Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan | 70% |
| | | 2. Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat waktu dan tepat sasaran | 100% |

1

| Kegiatan | Anggaran |
|---|---|
| 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp65.350.000,00 |
| 2. Pelaksanaan Koordinasi Pengumpulan Data Kinerja dan Pengaluran Kinerja Organisasi | Rp76.900.000,00 |
| 3. Pelaksanaan Kajian dan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja | Rp122.308.000,00 |
| 4. Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Organisasi | Rp56.300.000,00 |
| 5. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Kinerja Individu | Rp9.800.000,00 |
| 6. Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp1.800.000,00 |
| 7. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan, Penelaahan, dan Pembahasan Perencanaan Program dan Kegiatan RB di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp150.700.000,00 |
| 8. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, Pengoordinasian Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RB di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp30.550.000,00 |
| 9. Mengoordinasikan Pelaksanaan Manajemen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 | Rp9.500.000,00 |
| 10. Pengkajian dan Pengembangan RB di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp24.950.000,00 |
| 11. Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Ketatausahaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp634.639.000,00 |
| Total | Rp1.182.797.000,00 |

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

Beben Hurmansyah

2

## Perjanjian Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015

| Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet | 1. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet | B (65) |
| | 2. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja | 80% |
| | 3. Persentase dokumen akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| 2. Terwujudnya Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas | 1. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 65 |
| | 2. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Kabinet | 75 |
| | 3. Persentase dokumen reformasi birokrasi yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| 3. Terwujudnya Dukungan Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kabinet | 1. Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan | 70% |
| | 2. Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat waktu dan tepat sasaran | 100% |

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Optimalisasi pemberian dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan dibangun melalui komitmen terhadap pemenuhan target kinerja yang setiap tahunnya dilakukan perbaikan dari sisi indikator maupun target yang ditetapkan.

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi adalah salah satu motor penggerak berjalannya program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi memiliki 1 (satu) buah program yaitu **"Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Kabinet"** dan 1 (satu) kegiatan yaitu **"Pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet "**. Pelayanan Biro dimulai dari proses pengelolaan manajemen kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, sampai dengan pengendalian persuratan, ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet, seluruhnya dikoordinasikan oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel.

## A. Capaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Laporan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulanan. Kategori capaian kinerja yang digunakan pada tahun 2015 yaitu:

**Kategori Pencapaian Kinerja**

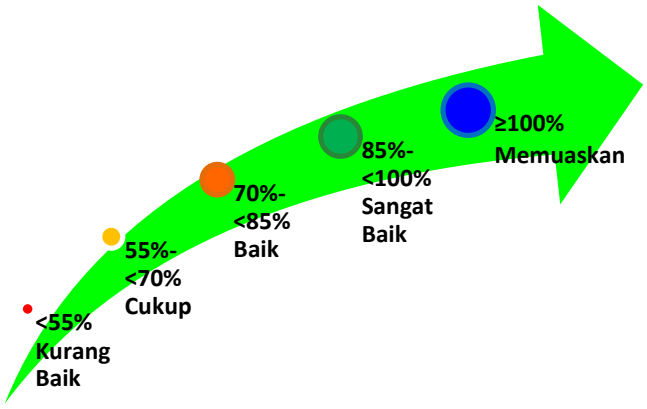


Capaian kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

**Capaian IKU Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| | 2015 | 2015 | 2015 |
| Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet | B (65) | B (66,09) | 101,67% |
| % tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja | 80% | 89% | 111,25% |
| Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 65 | 70,10 | 107,85% |
| Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Kabinet | 75 | 73,04 | 97,38% |
| % kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan | 70% | 70,56% | 100,8% |

Capaian kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi untuk setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam PK dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.

**Tujuan 1** — **Mewujudkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet**

**Sasaran 1**
Terwujudnya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

Sasaran pertama dicapai melalui kegiatan **"Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet"**. Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 1 pada Tahun 2015.

| Indikator Kinerja Sasaran 1 | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet | B (65) | B (66,09) | 101,67% |
| 2. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja | 80% | 89% | 111,25% |
| 3. Persentase dokumen akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

Dari ketiga indikator tersebut yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran pertama Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi ada 2 (dua) indikator, yaitu indikator pertama dan indikator kedua. Capaian dengan indikator warna **biru** masuk dalam kategori **memuaskan.**

Target *output* yang ditetapkan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan penyusunan dokumen terkait akuntabilitas kinerja pada tahun 2015 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen, dan berhasil terealisasi sebanyak 22 (dua puluh dua) dokumen. Rincian *output* sasaran 1 dapat dilihat pada lampiran II.

Berdasarkan rincian *output* sasaran 1, terdapat 2 (dua) *output* yang tidak terealisasi. Yang pertama adalah output laporan *Benchmarking* atas *Best Practice* pelaksanaan SAKIP tidak disusun karena pelaksanaan *benchmark* ditunda ke Tahun 2016. Kemudian yang kedua adalah *output* dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setelah restrukturisasi belum disusun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan waktu. Penyusunan dokumen SKP adalah tugas pokok dan fungsi Subbagian Manajemen Kinerja Individu. Kenyataannya pada saat ini pada Subbagian dimaksud tidak terdapat SDM sama sekali. Jadi terkait pengelolaan dokumen SKP dirangkap oleh staf pada Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi.

## 1.1. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet

Indikator pertama pada sasaran 1 sudah digunakan sejak Tahun 2014. Pada Tahun 2015 dengan target hasil penilaian AKIP Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah B. Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3942/M.PANRB/12/2015, tanggal 11 Desember 2015, hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Kabinet memperoleh nilai 66,09 dengan predikat "B", dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

| | Komponen Yang Dinilai | 2014 | | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai |
| a. | Perencanaan Kinerja | 35 | 32,22 | 30 | 21,34 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 20 | 12,81 | 25 | 14,45 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,31 | 15 | 10,50 |
| d. | Evaluasi Kinerja | 10 | 4,88 | 10 | 6,11 |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 14,08 | 20 | 13,69 |
| | **Nilai Hasil Evaluasi** | **100** | **65,30** | **100** | **66,09** |
| | **Tingkat Akuntabilitas Kinerja** | | **B** | | **B** |

Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (tengah), saat mengikuti rapat pembahasan hasil penilaian AKIP Sekretariat Kabinet oleh KEMENPAN & RB di Sekretaris Kabinet Tanggal 14 Januari 2016

Kementerian PAN dan RB merekomendasikan agar Sekretariat Kabinet melakukan penyempurnaan lebih lanjut dalam rangka mengefektifkan penerapan budaya kerja, yaitu:

1. Sekretariat Kabinet perlu memperhatikan penyusunan sasaran dan indikator unit kerja agar sasaran dan indikator kinerja yang dibuat telah mencerminkan kinerja sesuai peran dan fungsi unit kerja tersebut;
2. Secara kualitas, rencana aksi atas kinerja Sekretariat Kabinet perlu mencantumkan kegiatan dan target secara periodik atas kinerja dalam setiap rencana aksi yang disusun. Sehingga dalam pemanfaatannya rencana aksi dapat sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan identifikasi kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV;
3. Sekretariat Kabinet perlu merencanakan dan membangun aplikasi untuk penyajian ukuran keberhasilan organisasi yang langsung terkait dengan penggunaan anggaran sehingga setiap keberhasilan capaian organisasi maupun unit kerja dapat terpantau secara periodik;
4. Sekretariat Kabinet perlu memperhatikan kualitas dan keandalan informasi kinerja terutama di level unit kerja;
5. Inspektorat agar secara aktif mendorong perbaikan manajemen kinerja dengan cara memberikan rekomendasi perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;

6. Setiap pimpinan yang ada di Sekretariat Kabinet perlu mendorong terjadinya budaya kerja yang berorientasi hasil, melakukan inisiatif dalam pemberantasan korupsi dan melakukan sejumlah terobosan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pelaksanaan rekomendasi tersebut merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja dan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagai koordinatornya.

## 1.2. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja

Target yang ditetapkan untuk indikator kedua sasaran 1 pada tahun 2015 adalah 80%. Penetapan besaran target ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa hasil realisasi persentase tingkat pemanfaatan dengan menggunakan metode survei skala *likert* lebih rendah dari pada pertanyaan Ya/Tidak. Hal ini disebabkan karena nilai jawaban Ya akan mendapat skor absolut 100% sedangkan jawaban tidak absolut 0%, tidak ada preferensi lain seperti di skala *likert*. Kriteria persentase tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja, laporan dan hasil evaluasi terkait pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

| % Tingkat Pemanfaatan | Interpretasi |
|---|---|
| 81-100% | Sangat Bermanfaat |
| 61-80% | Bermanfaat |
| 41-60% | Kurang Bermanfaat |
| 21-40% | Tidak Bermanfaat |
| 0-20% | Sangat Tidak Bermanfaat |

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para pejabat eselon I, II, III, dan IV Sekretariat Kabinet yaitu sebanyak 50 (lima puluh) responden. Kategori pertanyaan pertama terkait dengan penyusunan dokumen atau laporan guna melihat partisipasi unit kerja dalam penyusunan dokumen serta kendala yang dihadapi oleh unit

kerja. Kategori pertanyaan kedua terkait dengan pemanfaatan dokumen atau laporan, dengan 5 (lima) aspek pemanfaatan yaitu:

1. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam menyusun perencanaan unit kerja di tahun berikutnya;
3. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja;
4. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk monitoring serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
5. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk perbaikan/peningkatan kinerja unit kerja.

Dari 50 (lima puluh) kuesioner yang dibagikan, seluruh kuesioner telah dikembalikan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Berikut ini hasil survei dari 5 (lima) aspek pemanfaatan dokumen/laporan:

| Aspek Pemanfaatan | Rata-rata % pemanfaatan |
|---|---|
| Pelaksanaan tugas dan fungsi | 89,44% |
| Penyusunan perencanaan unit kerja di tahun berikutnya | 89,04% |
| Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja | 88,84% |
| Monitoring serta evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja | 89,55% |
| Perbaikan/peningkatan kinerja unit kerja | 89,05% |
| **Persentase Tingkat Pemanfaatan** | **89,18%** |

Tingkat pemanfaatan kelima aspek tersebut berada pada rentang interval 81%-100% yaitu **Sangat Bermanfaat**. Selain dari aspek pemanfaatan hasil survei juga dapat dilihat dari sisi dokumen/laporan, berikut ini merupakan rata-rata tingkat pemanfaatan dokumen pelaksanaan kinerja Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2014 dan Tahun 2015.

| Dokumen/Laporan | % Rata-rata tingkat pemanfaatan | | |
|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | 77% | 78,74% | 88,82% |
| PK | 79,4% | 80,84% | 86,90% |
| IKU | 79,4% | 80,42% | 89,36% |
| Laporan Triwulanan Capaian/Realisasi Output dan Anggaran (PP39/2006) | 75,4% | 76% | 88,96% |
| **Persentase Tingkat Pemanfaatan** | **76,17%** | **78,95%** | **89,18%** |

Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menganggap tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja Tahun 2015 yang dihasilkan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi **sangat bermanfaat (89,18%)**, berada pada **rentang interval 81%-100%**. Terdapat peningkatan sebesar 10,23% dari tahun sebelumnya. Namun, dari segi interval tahun 2015 terdapat perubahan dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 dan 2014 digunakan internal 81% - 100% sangat bermanfaat sekali, **61% - 80% sangat bermanfaat**, 41% - 60% Bermanfaat, 21% - 40% kurang bermanfaat, 0% - 20% tidak bermanfaat. Hasil kuesioner tahun-tahun sebelumnya juga berada pada rentang Sangat Bermanfaat, sehingga sulit untuk menyimpulkan bahwa memang terjadi kenaikan tajam pada tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja.

Secara umum kendala yang dihadapi unit kerja dalam peningkatan pengukuran pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja tahun 2015 adalah mengalami kesulitan dalam pengumpulan data dokumen terkait serta penghitungan capaian kinerja, walaupun data capaian kinerja telah disampaikan melalui Sistem Monitoring Data Kinerja (Simonja) yang dapat diakses dengan *link* simonja.intranet, namun data dukung yang harus dilampirkan tetap dihitung secara manual dan/atau menggunakan teknik informasi teknologi (IT) sederhana di masing-masing unit kerja, serta teknik tersebut belum seragam/terstruktur secara lembaga/organisasi. Saran dan masukan yang diberikan unit kerja dalam rangka pengukuran pemanfaatan dokumen pelaksanaan akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada lampiran III.

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi akan senantiasa memperbaiki kualitas kuesioner pada tahun mendatang supaya mendapatkan hasil yang lebih objektif dan pertanyaan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi akan berusaha menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, dokumen dan laporan yang dihasilkan akan lebih bermanfaat.

Perkembangan capaian indikator kinerja kedua sasaran pertama dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

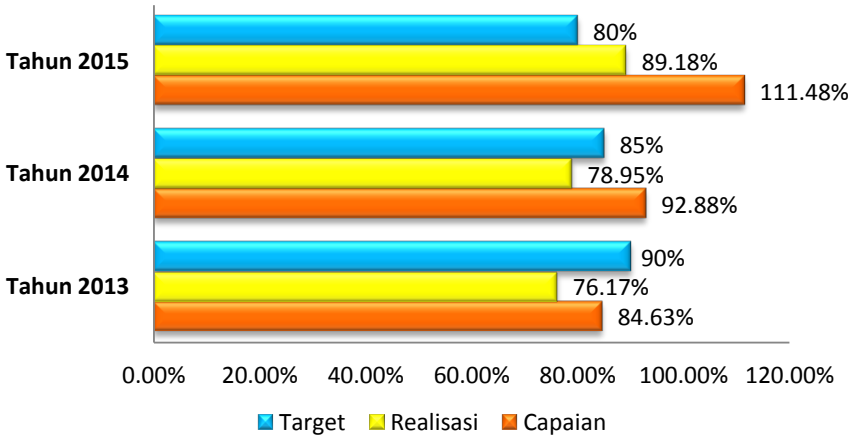


Indikator yang mengukur tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja sudah digunakan sejak Tahun 2009. Awalnya menitikberatkan kepada persentase unit kerja yang memanfaatkan dokumen/laporan yang kemudian diubah Tahun 2013 dengan menitikberatkan kepada persentase tingkat pemanfaatan dokumen. Fokus penilaian ada pada seberapa bermanfaatnya dokumen/laporan bagi unit kerja, bukan apakah unit kerja memanfaatkan dokumen/laporan tersebut atau tidak. Metode survei juga mengalami perbaikan, sebelumnya menggunakan metode "pertanyaan Ya/Tidak" kemudian diubah dengan metode skala likert pada Tahun 2013, skala likert menggunakan 5 skala preferensi yaitu tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, bermanfaat, sangat bermanfaat, dan sangat bermanfaat

sekali. Kemudian pada Tahun 2015 skala likert yang menggunakan 5 skala preferensi, interpretasinya diubah menjadi sangat tidak bermanfaat, tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, bermanfaat, dan sangat bermanfaat. Dengan mempertimbangkan adanya perubahan teknis dan metode survei tentunya pembandingan yang relevan adalah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, namun tetap memperhatikan adanya perubahan target.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan dokumen/laporan khususnya Laporan Kinerja, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2015 telah mengusulkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mengembangkan Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA) Sekretariat Kabinet, yang memudahkan unit kerja dalam melaporkan capaian triwulanan serta dapat dipantau langsung oleh pimpinan unit kerja sehingga jika terdapat kendala pencapaian kinerja dapat segera diatasi.

## 1.3. Persentase dokumen akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2013. Ketepatan waktu penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja merupakan salah satu faktor penting, sebab keterlambatan akan mengurangi manfaat dari dokumen/laporan yang dihasilkan. Perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja ketiga sasaran 1 tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

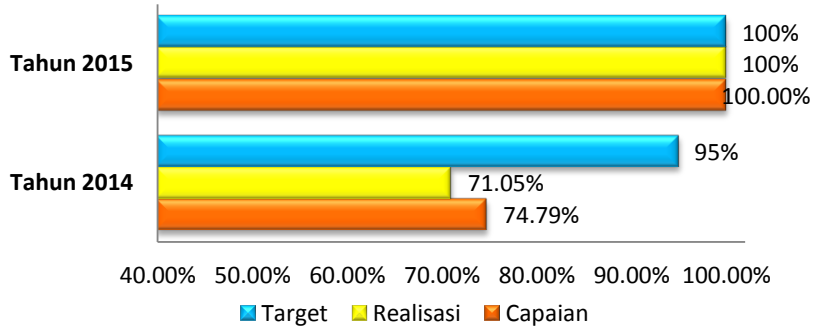

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 100%, naik 5% dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 capaian indikator juga mengalami kenaikan yaitu menjadi **100**% (**Memuaskan**), realisasi atas indikator ini naik dari 71,05% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2015. Dari 22 (dua puluh dua) dokumen/laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi keseluruhannya disusun tepat waktu. Penghitungan ketepatan waktu dapat dilihat pada lampiran IV.

**Tujuan 2** — **Mewujudkan dukungan manajemen reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang berkualitas**

**Sasaran 2**
**Terwujudnya dukungan manajemen reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang berkualitas**

Sasaran kedua dicapai melalui kegiatan **"Pengoordinasian penyelenggaraan manajemen reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet"**, yang dijabarkan kedalam 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan pembahasan perencanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2015;
4. Pengkajian dan pengembangan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 2 pada Tahun 2015.

| Indikator Kinerja Sasaran 2 | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. Hasil penilaian reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet oleh KEMENPAN dan RB | | | |

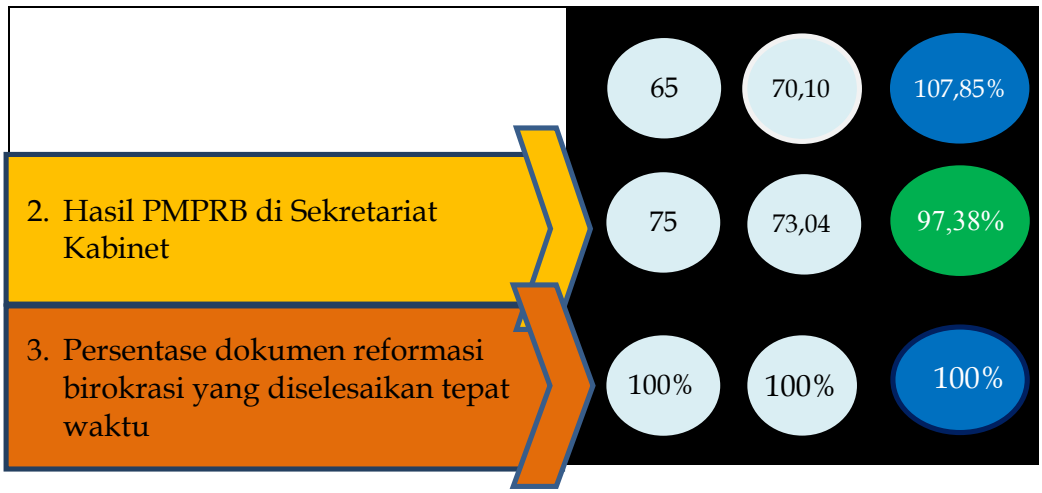


Dari ketiga indikator tersebut yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran 2 Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi ada 2 (dua) indikator, yaitu indikator pertama dan indikator kedua. Capaian dengan indikator warna **biru** masuk dalam kategori **memuaskan** dan warna **hijau** masuk dalam kategori **sangat baik.**

Target *output* yang ditetapkan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan penyusunan dokumen terkait reformasi birokrasi pada Tahun 2015 sebanyak 4 (empat) dokumen, terealisasi sebanyak 3 (tiga) dokumen. Rincian capaian *output* sasaran 2 dapat dilihat paga lampiran V.

Berdasarkan rincian *output* di atas, terdapat 1 (satu) *output* yang tidak terealisasi di tahun 2015, yaitu *draft Work Plan* atau Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016, karena penyempurnaan *draft* Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksud perlu disesuaikan dengan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 yang telah disempurnakan. Konsekuensi logis dari upaya penyempurnaan ini adalah penambahan waktu untuk penyelesaian dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016 menjadi lebih panjang (*carried over*) ke awal tahun 2016.

## 2.1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh KEMENPAN dan RB

Target hasil penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) adalah 65. Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/07/D.I.PANRB-UPRBN/12/2015, tanggal 22 Desember 2015, hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet memperoleh **nilai Indeks** Reformasi Birokrasi **70,10** dengan kategori "B", dimana terdapat **peningkatan** nilai indeks **dari tahun 2014** dengan perolehan nilai **65,34**. Adapun **capaian target kinerja** untuk indikator kinerja 1 sasaran 2 adalah **107,85%**. Rincian capaian dan area perbaikan yang dibutuhkan terhadap hasil penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet oleh KEMENPAN dan RB dapat dilihat pada lampiran VI.

Sekretariat Kabinet telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan, antara lain:

a. Sekretariat Kabinet dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah melakukan dengan mekanisme promosi secara terbuka.
b. Telah menerapkan penggunaan Teknologi Informasi untuk memudahkan pemberian pelayanan dengan surat elektronik/*e-mail* ketika mengundang Kementerian/Lembaga untuk persidangan/rapat kabinet.
c. Hasil persidangan yang tidak bersifat rahasia dapat diakses melalui *online* di *website* Sekretariat Kabinet.
d. Sekretariat Kabinet menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap pengelolaan reformasi birokrasi melalui pembentukan unit kerja yang menangani akuntabilitas dan reformasi birokrasi.
e. Penguatan peran Sekretariat Kabinet dalam mengendalikan sistem penyusunan perundang-undangan, utamanya melakukan monitoring terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden.

Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (tengah), saat mengikuti kegiatan reviuw hasil evaluasi RB dan AKIN di Bandung, Tanggal 18 Desember 2015

Selanjutnya Kementerian PAN dan RB merekomendasikan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima layanan dari Sekretariat Kabinet, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sudah baik dan memiliki sistem yang yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu dilakukan perbaikan diantaranya:

i. Perlu memperhatikan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta indikator kinerja individu dengan indikator kinerja diatasnya (*cascade down*). Selanjutnya melakukan monitoring pencapaian kinerja individu secara berkala yang dilakukan secara *online*.

ii. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan karir pegawai.

iii. Perlu dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan prosedur operasional agar sesuai dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi.

iv. Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi perlu mengkomunikasikan *Road Map* dan rencana aksi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai.

v. Perlu dilakukan evaluasi terhadap manajemen perubahan serta mengaktifkan peran agen perubahan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

2) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

Hasil survei atas indeks persepsi anti korupsi menunjukkan gambaran yang cukup baik. Dalam skala 4, indeks persepsi anti korupsi Sekretariat Kabinet menunjukkan angka 3,13. Sekretariat Kabinet terus berupaya meningkatkan budaya anti korupsi dan tata kelola keuangan, hal ini tercermin dengan keberhasilan capaian signifikan melalui diperolehnya opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal penting yang masih perlu disempurnakan yaitu:

i. Perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

ii. Menginformasikan dan mengkomunikasikan sistem pengawasan internal kepada *stakeholder* terkait.

iii. Menerapkan kebijakan dan meningkatkan integritas pegawai dalam upaya pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, *Whistle Blowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.

iv. Membangun unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014.

v. Optimalisasi upaya tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan yang diberikan serta penyediaan akses yang terbuka atas hasil survei kepuasan masyarakat.

3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB bersama Badan

Pusat Statistik (BPS) terhadap pemberian layanan ijin prakarsa Sekretariat Kabinet dari skala 4, Sekretariat Kabinet memperoleh angka 2,69. Hal ini mencerminkan bahwa masih perlu pengembangan pada pelayanan terkait ijin prakarsa agar kualitas pelayanan publik Sekretariat Kabinet lebih optimal. Layanan terkait ijin prakarsa masih dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan di kemudian hari, mengingat ijin prakarsa merupakan bidang baru bagi Sekretariat Kabinet, dengan diberlakukannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Sementara itu, berdasarkan hasil survei persepsi pelayanan publik, Sekretariat Kabinet memperoleh nilai 3,02 dari skala 4.

Hal yang perlu dilakukan (area of improvement) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain:

1) Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala kemudian meng-*upload* hasil survei tersebut agar mudah diakses secara terbuka, dan menindaklanjuti hasil survei.

2) Dalam pemberian pelayanan perlu meng-*update* informasi pelayanan dan perbaikan pelayanan secara berkala atas pemanfaatan teknologi.

## 2.2. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Kabinet

**Target** hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Kabinet adalah **75**. Berdasarkan Memorandum Inspektur Sekretariat Kabinet Nomor M-151/IPT/4/2015 tanggal 24 April 2015, hal Laporan Hasil Evaluasi Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet **Tahun 2014**, Sekretariat Kabinet memperoleh **nilai Indeks capaian 73,04**. Adapun **capaian target kinerja** untuk indikator kinerja 2 sasaran 2 adalah **97,38%**. Penilaian terhadap PMPRB tahun 2015 mencakup pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet selama periode tahun 2014, karena

periode penilaian PMPRB sendiri dilaporkan pada bulan April tahun berikutnya. Lebih lanjut, pelaksanaan PMPRB secara online dan mandiri dimulai pada pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Rincian capaian dan area perbaikan yang dibutuhkan terhadap hasil PMPRB di Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada lampiran VII.

## 2.3. Persentase dokumen reformasi birokrasi yang diselesaikan tepat waktu

Ketepatan waktu penyusunan dokumen reformasi birokrasi merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pencapaian kinerja unit kerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, mengingat dokumen-dokumen yang disusun menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet.

Untuk **target** yang ditetapkan pada **tahun 2015** adalah **100%**, dengan **capaian indikator 100%** (memuaskan). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 1 (satu) *output* yang tidak terealisasi di tahun 2015, yaitu *draft Work Plan* atau Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016, karena penyempurnaan *draft* Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksud perlu disesuaikan dengan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 yang telah disempurnakan. Konsekuensi logis dari upaya penyempurnaan ini adalah penambahan waktu untuk penyelesaian dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016 menjadi lebih panjang (*carried over*) ke awal tahun 2016.

**Tujuan 3** — **Mewujudkan dukungan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet**

**Sasaran 3**
Terwujudnya dukungan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Sasaran ketiga dicapai melalui kegiatan **"Penggoordinasian pelayanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet"**. Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 3 pada Tahun 2015.

| Indikator Kinerja Sasaran 3 | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan | 70% | 70,56% | 100,8% |
| 2. Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat waktu dan tepat sasaran | 100% | 100% | 100% |

Dari kedua indikator tersebut yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran ketiga Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yaitu indikator pertama. Kedua capaian masuk dalam kategori memuaskan. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena IKU ini baru ada pada Tahun 2015.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan diperlukan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan maksud untuk memberikan masukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Adapun penetapan target untuk indikator ini memang belum bisa ditetapkan secara optimal, karena selain merupakan indikator yang baru ada di tahun 2015, juga masih memerlukan atau mencari mekanisme serta standar pengukuran yang tepat untuk digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan target terkait dengan indikator kepuasan ditetapkan sebesar 70%, dengan asumsi bahwa masih

banyak perbaikan yang perlu dilakukan oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan pelayanan.

## 3.1. Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan

Pengukuran tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan persuratan dan ketatausahaan dilakukan kepada unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet. Survei yang dilakukan dengan memberikan 12 (dua belas) pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan *stakeholder* mengenai layanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha. Survei tingkat kepuasan ini mengacu pada pemberian layanan yang berkualitas, yaitu:

1. Ketanggapan dalam pelayanan (*responsiveness*);
2. Keandalan dalam pelayanan (*reliability*);
3. Kepastian dalam pelayanan (*assurances*);
4. Sikap dalam pelayanan (*emphaty*);
5. Sarana dan prasarana fisik (*tangible*).

Kriteria persentase tingkat kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan adalah sebagai berikut:

| % Tingkat Kepuasan | Interpretasi |
|---|---|
| 81-100% | Sangat Puas |
| 61-80% | Puas |
| 41-60% | Cukup Puas |
| 21-40% | Kurang Puas |
| 0-20% | Tidak Puas |

Dari 120 (seratus dua puluh) kuesioner yang disebarkan, yang kembali sebanyak 101 (seratus satu) kuesioner. Hasil dari kuesioner kepuasan unit kerja terhadap layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan dengan nilai rata-rata indeks kepuasan secara keseluruhan sebesar 70,56%. Berikut ini hasil survei dari 5 (aspek) tingkat kepuasan layanan persuratan:

| Aspek Kepuasan | Rata-rata % Kepuasan |
|---|---|
| Ketanggapan dalam pelayanan (*responsiveness*) | 73,15% |
| Keandalan dalam pelayanan (*reliability*) | 71,56% |
| Kepastian dalam pelayanan (*assurances*) | 71,19% |
| Sikap dalam pelayanan (*emphaty*) | 72,23% |
| Sarana dan prasarana fisik (*tangible*) | 64,68% |
| **Persentase Tingkat Kepuasan** | **70,56%** |

Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menganggap tingkat kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi memuaskan (70,56%), berada pada rentang interval 61-80%.

Dari kuesioner yang diberikan, terdapat beberapa saran dari responden, yaitu:

1. Perlu dipertimbangkan untuk penggunaan SPDE atau tata naskah dinas elektronik sehingga data persuratan yang diajukan bisa diolah lebih akurat dan cepat, pemberian pelatihan pelayanan prima kepada pegawai di lingkungan unit Tata Usaha;
2. Optimalisasi program aplikasi surat yang fungsinya bisa mengena kesetiap individu, penggunaan email bagi setiap pegawai agar untuk dokumen rahasia tidak menggunakan email gmail, yahoo, dsb;
3. Dioptimalkan penggunaan aplikasi persuratan, jika belum ada sebaiknya dirancang dan segera dikembangkan;
4. Tersedianya sistem persuratan secara elektronik, tersedianya resepsionis yang ramah dan tanggap, tersedianya ruang TU persuratan yang nyaman, kedepan perlu adanya layar monitor penelusuran surat secara mandiri;
5. Meningkatkan kebersihan dan kerapihan ruang layanan persuratan, apabila ada surat-surat yang perlu dikirim, kiranya dapat segera dikirim.

**3.2. Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat waktu dan tepat sasaran**

Selain Indikator Kinerja Utama yang telah disebutkan di atas, pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015, terdapat satu indikator kinerja lainnya yaitu persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga perlu kami jelaskan mengenai rumusan **"tepat waktu dan tepat sasaran"** yang digunakan menekankan pada telah dilaksanakannya distribusi surat dengan menyampaikannya kepada Pimpinan untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti/diproses oleh unit kerja Eselon I dan Eselon II terkait berdasarkan arahan Pimpinan. Dengan demikian, semakin banyak berkas administrasi ketatausahaan yang telah didistribusikan secara tepat kepada pemangku kepentingan berarti kinerja layanan persuratan dan ketatausahaan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi semakin tinggi.

Perhitungan dilakukan dari 13.155 surat/berkas yang masuk, seluruhnya telah didistribusikan kepada unit kerja pengolah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Gambaran lebih rinci terhadap realisasi penanganan surat/berkas yang didistribusikan tepat sasaran selama Tahun 2015, dapat dilihat pada lampiran VIII.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu yang diperjanjikan dalam PK Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi adalah Rp.1.182.797.000,00. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

| SASARAN | PAGU AWAL* | PAGU REVISI* | REALISASI* | % REALISASI | %CAPAIAN KINERJA** |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet | | | | | |
| SASARAN 1 | 332.458.000 | 333.025.000 | 135.950.000 | 40,82% | 104,30% |
| Terwujudnya dukungan manajemen reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang berkualitas | | | | | |
| SASARAN 2 | 215.700.000 | 295.671.000 | 181.359.000 | 61,34% | 101,74% |
| Terwujudnya dukungan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet | | | | | |
| SASARAN 3 | 634.639.000 | 563.101.000 | 349.388.739 | 62,05% | 100,40% |
| TOTAL | 1.182.797.000 | 1.191.797.000 | 666.697.739 | 55,94% | 102,14% |

*dalam rupiah
**rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp.1.191.797.000,-, sampai dengan 31 Desember 2015 penyerapan anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi adalah Rp.666.697.739,- atau **55,94**%. Anggaran tidak terserap sebesar Rp.525.099.261,- atau 44,06%. Anggaran tersebut tidak terserap karena ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya ditunda ke Tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena adanya restrukturisasi organisasi pada pertengahan Tahun 2015, sehingga rencana kegiatan terkendala oleh waktu yang hanya tersisa beberapa bulan sedangkan banyak prioritas kegiatan lain yang harus segera diselesaikan. Kemudian terkait persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yaitu 102,14% (**Memuaskan**).

# BAB IV

## PENUTUP

# PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet yang telah memberikan amanah dan tugas. Tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dapat dicapai, dilihat dari capaian indikator kinerja masing-masing sasaran maka dapat disimpulkan bahwa capaian Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan rata-rata capaian **102,14%** ada pada kategori **Memuaskan**. Meskipun tingkat capaian tersebut sangat memuaskan, masih tetap ada beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang.

Tidak hanya penyempurnaan perumusan indikator kinerja dan target kinerja yang lebih baik tetapi juga perlu dilakukan penyempurnaan pengumpulan data guna mengukur capaian kinerja. Keterbatasan dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu hal penting yang juga perlu diperbaiki.

Untuk meningkatkan kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi perlu dibuat strategi atau rencana aksi pada Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Melakukan *review* atas realisasi target kinerja dan anggaran secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan melakukan antisipasi jika terdapat masalah;
2. Melakukan *review* terhadap penyelenggaraan kegiatan sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan perencanaan kinerja di masa-masa mendatang;
3. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Membenahi sistem pengarsipan sehingga memudahkan pihak internal dan eksternal dalam memperoleh data dan informasi;
5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan;

6. Melakukan pengembangan Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA), misalnya dengan memasukkan unsur *feedback* dan monitoring pimpinan guna memperbaiki hal-hal teknis seperti perbedaan digit angka realisasi dan capaian agar dihasilkan nilai kinerja yang lebih akurat;
7. Melakukan pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis Teknologi Informasi.

Penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan laporan kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan dan penyusunan kebijakan organisasi, maupun bagi seluruh *stakeholders* dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan dukungan kepada organisasi Sekretariat Kabinet.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN I

## CAPAIAN KINERJA BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Terwujudnya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet | Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet | B (65) | B (66,09) | 101,67% |
| | Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja | 80% | 89% | 111,25% |
| | Persentase dokumen akuntabilitas kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| Terwujudnya dukungan manajemen reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang berkualitas | Hasil penilaian reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet oleh KEMENPAN & RB | 65 | 70,10 | 107,85% |
| | Hasil PMPRB di Sekretariat Kabinet | 75 | 73,04 | 97,38% |
| | Persentase dokumen reformasi birokrasi yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| Terwujudnya dukungan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet | Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan | 70% | 70,56% | 100,8% |
| | Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat waktu dan tepat sasaran | 100% | 100% | 100% |

Jumlah Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015:
Rp. 1.191.797.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015:
Rp. 666.697.739

## LAMPIRAN II

## RINCIAN OUTPUT SASARAN 1 BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015

| No. | *Output* | Jumlah *Output* | |
|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi |
| 1. | Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2. | PK Perubahan Deputi Bidang Administrasi Tahun 2015 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 3. | PK Perubahan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 4. | Draft PK Sekretariat Kabinet Tahun 2016 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 5. | Draft PK Deputi Bidang Administrasi Tahun 2016 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 6. | Draft PK Perubahan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 7. | IKU Perubahan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 8. | IKU Perubahan Deputi Bidang Administrasi Tahun 2015 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 9. | IKU Perubahan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 10. | Draft IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2016 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 11. | Draft IKU Deputi Bidang Administrasi Tahun 2016 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 12. | Draft IKU Perubahan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 13. | Laporan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pengelolaan Data Kinerja (Permintaan Penyempurnaan Sistem kepada Pusdatin) | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 14. | Data Capaian Kinerja Triwulan III s.d. 12 Agustus 2015 (Sebelum Restrukturisasi) | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 15. | Data Capaian Kinerja Triwulan III 12 Agustus s.d. 30 September 2015 (Setelah Restrukturisasi) | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 16. | Data Capaian Kinerja Individu | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 17. | Laporan Benchmarking atas Best Practice Pelaksanaan SAKIP | 1 Dokumen | - |
| 18. | Penyusunan SOP Bagian Akuntabilitas | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

| No. | *Output* | Jumlah *Output* | |
|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi |
| | Kinerja | | |
| 19. | Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan LAKIP | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 20. | RAPK Sekretariat Kabinet setelah restrukturisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 21. | RAPK Deputi Bidang Administrasi setelah restrukturisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 22. | RAPK Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi setelah restrukturisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 23. | Dokumen Sasaran Kerja Pegawai setelah restrukturisasi | 1 Dokumen | - |
| 24. | Verifikasi penilaian SKP seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Setkab | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| **TOTAL DOKUMEN** | | **24** | **22** |

## LAMPIRAN III

## SARAN DAN MASUKAN YANG DIBERIKAN UNIT KERJA DALAM RANGKA PENGUKURAN PEMANFAATAN DOKUMEN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA

| No | Kritik dan Saran | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Terkait penyampaian laporan | | |
| 1 | Dokumen-dokumen akuntabilitas kinerja seperti LKj, PK, IKU perlu di *share* dalam bentuk *soft copy*. Karena selama ini dokumen-dokumen akuntabilitas kinerja hanya di share 1 (satu) *hard copy* ke semua unit kerja, hal seperti ini mempersulit sosialisasi kepada bawahan. | Dokumen Akuntabilitas Kinerja sudah diunggah ke situs Setkab.go.id. Untuk sosialisasi, kedepan akan dikirimkan memorandum pemberitahuan bahwa dokumen dapat diunduh di situs Setkab.go.id |
| Terkait penyusunan laporan | | |
| 2 | Perlu komunikasi dalam penyusunan dan pelaporan dari unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unit kerja lain dan Eselon I dan II lebih intensif, supaya ada kesamaan persepsi sehingga memudahkan penyusunan dan pelaporan | Dilakukan sosialisasi dan pendampingan baik dengan mengadakan rapat maupun konsultasi langsung |
| Terkait pemanfaatan laporan | | |
| 3 | Perlu adanya pertemuan bersama dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten untuk memahami dan menyamakan persepsi tentang pemanfaatan dokumen/ laporan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan tugas dan fungsi unit kerja | Unit kerja terkait hendaknya menjadikan dokumen/laporan yang ada sebagai dasar menindaklanjuti saran yang disampaikan dalam dokumen/laporan. Perbaikan kualitas laporan senantiasa dilakukan supaya pemanfaatan dokumen/laporan dapat optimal. |
| Terkait monitoring pemanfaatan | | |
| 4 | Agar Biro akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melakukan monitoring secara berkala melalui survei lapangan ke seluruh unit kerja guna memastikan pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja berjalan dengan optimal | Monitoring secara fisik sebaiknya dilakukan oleh Inspektorat, yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta melakukan evaluasi AKIP di lingkungan internal Sekretariat Kabinet |

| No | Kritik dan Saran | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Terkait sistem teknologi informasi | | |
| 5 | Perlu dibangun sistem pencatatan untuk realisasi anggaran dan kinerja secara elektronik, terintegrasi, dan seragam (mempunyai standar yang sama) untuk seluruh kedeputian, mengingat saat ini masing-masing unit kerja membangun sistem pencatatan sendiri-sendiri sehingga penilaiannya menjadi tidak *fair* karena masing-masing menggunakan sistem yang berbeda. | • Perlu disusun SOP Pengumpulan data kinerja dan Penghitungan Capaian Kinerja, sehingga unit organisasi dengan tupoksi yang sama tetapi berbeda bidang dapat menggunakan cara yang sama dalam menghitung capaian kinerjanya.<br>• Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi bersama Pusdatin akan bekerja sama terus mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis TI, sehingga memberikan kemudahan pengumpulan dan penghitungan capaian baik realisasi anggaran maupun capaian kinerja, kemudahan pengaksesan, pemanfaatan dan pengelolaan data, serta efisiensi waktu, tenaga dan ruang penyimpanan data/arsip. |

## LAMPIRAN IV

# PENGHITUNGAN KETEPATAN WAKTU DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA YANG DIHASILKAN BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

| No. | *Output* | Batas Penyelesaian Dokumen | Jumlah *Output* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Realisasi | Tepat Waktu |
| 1. | Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 2. | PK Perubahan Deputi Bidang Administrasi Tahun 2015 | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 3. | PK Perubahan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 4. | Draft PK Sekretariat Kabinet Tahun 2016 | 31 Desember 2015 | 1 | 1 |
| 5. | Draft PK Deputi Bidang Administrasi Tahun 2016 | 31 Desember 2015 | 1 | 1 |
| 6. | Draft PK Perubahan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 | 31 Desember 2015 | 1 | 1 |
| 7. | IKU Perubahan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 8. | IKU Perubahan Deputi Bidang Administrasi Tahun 2015 | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 9. | IKU Perubahan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 10. | Draft IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2016 | 31 Desember 2015 | 1 | 1 |
| 11. | Draft IKU Deputi Bidang Administrasi Tahun 2016 | 31 Desember 2015 | 1 | 1 |
| 12. | Draft IKU Perubahan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 | 31 Desember 2015 | 1 | 1 |
| 13. | Laporan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pengelolaan Data Kinerja (Permintaan Penyempurnaan Sistem kepada Pusdatin) | 30 September 2015 | 1 | 1 |
| 14. | Data Capaian Kinerja Triwulan III s.d. 12 Agustus 2015 (Sebelum Restrukturisasi) | 15 September 2015 | 1 | 1 |
| 15. | Data Capaian Kinerja Triwulan III 12 Agustus s.d. 30 September 2015 (Setelah Restrukturisasi) | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 16. | Data Capaian Kinerja Individu | 31 Desember 2015 | 1 | 1 |

| No. | *Output* | Batas Penyelesaian Dokumen | Jumlah *Output* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Realisasi | Tepat Waktu |
| 17. | Penyusunan SOP Bagian Akuntabilitas Kinerja | 28 Desember 2015 | 1 | 1 |
| 18. | Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan LAKIP | 17 Desember 2015 | 1 | 1 |
| 19. | RAPK Sekretariat Kabinet setelah restrukturisasi | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 20. | RAPK Deputi Bidang Administrasi setelah restrukturisasi | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 21. | RAPK Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi setelah restrukturisasi | 30 Oktober 2015 | 1 | 1 |
| 22. | Verifikasi penilaian SKP seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Setkab | 31 Desember 2015 | 1 | 1 |
| **TOTAL DOKUMEN/LAPORAN** | | | **22** | **22** |
| **% CAPAIAN** | | | **100%** | |

## LAMPIRAN V

## RINCIAN CAPAIAN OUTPUT SASARAN 2 BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

| No. | *Output* | Jumlah *Output* | |
|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi |
| 1. | Dokumen *Draft Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2. | Dokumen *Draft* Work *Plan* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2016 | 1 Dokumen | - |
| 3. | Dokumen *Draft* Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan *Quick Wins* Sekretariat Kabinet | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 4. | Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| **TOTAL DOKUMEN** | | **4 Dokumen** | **3 Dokumen** |

# LAMPIRAN VI

## RINCIAN CAPAIAN DAN AREA PERBAIKAN YANG DIBUTUHKAN TERHADAP HASIL PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET OLEH KEMENPAN DAN RB

| No. | Komponen Penilaian | Nilai Maksimal | Nilai 2014 | Nilai 2015 | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | **Pengungkit** | | | | |
| 1. | Manajemen Perubahan | 5,00 | 4,79 | 3,79 | 75,72 |
| 2. | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 75,00 |
| 3. | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6,00 | 3,60 | 3,84 | 64,06 |
| 4. | Penataan Tatalaksana | 5,00 | 4,51 | 3,76 | 75,20 |
| 5. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,00 | 5,69 | 13,18 | 87,89 |
| 6. | Penguatan Akuntabilitas | 6,00 | 3,20 | 3,80 | 63,40 |
| 7. | Penguatan Pengawasan | 12,00 | 3,81 | 4,56 | 38,00 |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,00 | 5,80 | 3,99 | 66,56 |
| | **Sub Total Komponen Pengungkit** | **60,00** | **36,40** | **40,67** | **67,80** |
| B | **Hasil** | | | | |
| 1. | Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20,00 | 14,93 | 14,22 | 71,10 |
| 2. | Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 6,50 | 8,84 | 84,78 |
| 3. | Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 7,50 | 6,37 | 67,25 |
| | **Sub Total Komponen Hasil** | **40,00** | **28,93** | **29,43** | **73,57** |
| **Indeks Reformasi Birokrasi** | | **100,00** | **65,34** | **70,10** | **70,10** |

# LAMPIRAN VII

## RINCIAN CAPAIAN DAN AREA PERBAIKAN YANG DIBUTUHKAN TERHADAP HASIL PENILAIAN PMPRB DI SEKRETARIAT KABINET

| A. | Komponen Proses | Bobot | Nilai Capaian RB | % Capaian Terhadap Bobot |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manajemen Perubahan | 5 | 4,3 | 85,95 |
| 2. | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5 | 3,75 | 75,00 |
| 3. | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6 | 6 | 100,00 |
| 4. | Penataan Tatalaksana | 5 | 5 | 100,00 |
| 5. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15 | 8,13 | 54,21 |
| 6. | Penguatan Akuntabilitas | 6 | 3,44 | 57,40 |
| 7. | Penguatan Pengawasan | 12 | 6,73 | 56,04 |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6 | 6 | 100,00 |
| **Total Komponen Proses** | | **60** | **43,35** | **72,25** |
| **B.** | **Komponen Hasil** | **Bobot** | **Nilai Capaian RB** | **% Capaian Terhadap Bobot** |
| 1. | Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20 | 13,94 | 69,71 |
| 2. | Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN | 10 | 8,25 | 82,50 |
| 3. | Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 7,50 | 75 |
| **Total Komponen Hasil** | | **40** | **29,69** | **74,23** |
| **Total Capaian Pelaksanaan RB (Proses dan Hasil)** | | **100** | **73,04** | **73,04** |

## LAMPIRAN VIII

## GAMBARAN RINCI TERHADAP REALISASI PENANGANAN SURAT/BERKAS YANG DIDISTRIBUSIKAN TEPAT SASARAN SELAMA TAHUN 2015

| Bulan | Jumlah surat/berkas | Jumlah berkas yang didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran |
|---|---|---|
| Januari | 1061 | 1061 |
| Februari | 721 | 721 |
| Maret | 811 | 811 |
| April | 850 | 850 |
| Mei | 722 | 722 |
| Juni | 1071 | 1071 |
| Juli | 1272 | 1272 |
| Agustus | 2506 | 2506 |
| September | 1324 | 1324 |
| Oktober | 1501 | 1501 |
| November | 1322 | 1322 |
| Desember | 982 | 982 |
| **TOTAL SURAT/BERKAS** | **13.155** | **13.155** |
| **% CAPAIAN** | **100%** | |